



## JURNAL EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jeber>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/3g4gzg54>

### DETERMINASI EFISIENSI SEKTOR PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR

**Jauhar Fikrinanda Rahmadi <sup>a\*</sup>, Parikesit Penangsang <sup>b</sup>**

<sup>a</sup> fikirahmadi10@gmail.com, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

Jl. Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

<sup>b</sup> parikesit\_1@untag-sby.ac.id, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

Jl. Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

\* coresspondence

#### ABSTRACT

*Regional income is an input in economic development. This sector includes local original income, balancing funds, and other legitimate income which is used as regional government capital in an effort to improve better regional economic development. This research aims to analyze the efficiency of the public sector, namely district/city regional income in East Java Province which consists of local original income (PAD), balancing funds, and other legitimate income as input variables in efforts to carry out economic development as seen from GRDP, HDI, and the number of people who are not poor as output variables for indicators of regional economic development. The results of this research are that there are five regions in East Java Province in 2017-2021 that are efficient, namely Bojonegoro Regency, Gresik Regency, Pasuruan Regency, Kediri City, and Surabaya City, while in 2020 there are six efficient regions, an increase of one other area, namely Regency Banyuwangi, which achieved a relative efficiency level of 100%, is apart from the five regions which were previously efficient in using input to produce output based on analysis using the Data Envelopment Analysis (DEA) method.*

**Keywords:** *Regional income, Economic Development, Efficiency, Inefficiency, Public Sector.*

#### Abstrak

Pendapatan daerah merupakan input dalam pembangunan ekonomi. Sektor tersebut yaitu meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah yang digunakan sebagai modal pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi sektor publik yaitu pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain-pendapatan yang sah sebagai variabel input dalam upaya melakukan pembangunan ekonomi yang dilihat dari PDRB, IPM, dan jumlah penduduk yang tidak miskin sebagai variabel output indikator pembangunan ekonomi daerah. Hasil dari penelitian ini terdapat lima daerah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2021 yang efisien yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kota Kediri, dan Kota Surabaya sedangkan pada tahun 2020 terdapat enam daerah yang efisien, bertambah satu daerah lain yaitu Kabupaten Banyuwangi yang mencapai tingkat efisiensi relatif 100% selain lima daerah yang sebelumnya telah efisien dalam penggunaan input untuk menghasilkan output berdasarkan analisis menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).

**Kata Kunci:** Pendapatan daerah, Pembangunan Ekonomi, Efisiensi, Inefisiensi, Sektor Publik.

#### 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia pemerintah telah mendominasi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Dari proposional rata-rata Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekitar 80% pendapatan negara telah dihasilkan oleh mekanisme sektor publik (PPA UGM, 2000). Sumber daya yang dimiliki oleh daerah

*Received Mei 11, 2024; Revised Mei 20, 2024; Accepted Juni 28, 2024*

hendaknya dapat diberdayakan dengan semaksimal mungkin untuk mencapai pelayanan sektor publik yang lebih baik, dan tepat sasaran untuk masyarakat, dengan kata lain bahwa alokasi pengeluaran pemerintah dari berbagai sumber.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah sejak era reformasi yang memiliki tujuan utama yaitu mencapai pemerintahan yang efisien, yang mampu memberdayakan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai kesejahteraan dan peningkatan ekonomi, disamping itu sistem otonomi daerah bertujuan untuk agar pemerintah daerah dapat secara mandiri mengelola tatanan pemerintahannya termasuk juga dalam bidang pengelolaan keuangan, baik mengelola sumber pendapatan daerah maupun dalam pengeluaran pemerintah. Dasar hukum otonomi daerah antara lain adalah telah disahkannya UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai perubahan UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 dimaksudkan untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Dengan menerapkan sistem desentralisasi, proses tata kelola pemerintahan dalam rangka pembangunan daerah yang lebih efisien dan tepat sasaran karena sistem desentralisasi telah diberi wewenang untuk menyelenggarakan program-program pembangunan, sehingga seluruh pertanggungjawaban, pengelolaan, dan pembiayaan dan pelayanan publik serta pengelolaan asset pemerintah lainnya dapat dijalankan dengan lebih akurat dan juga optimal oleh pemerintah daerah desentralisasi.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah melalui Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, terdapat enam fungsi otoritas yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemudian fungsi pengelolaan pengeluaran pemerintah dari sumber dana pendapatan daerah yaitu sebagai distribusi anggaran harus dirahkan agar dapat menuntaskan masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan serta problematika dalam proses pembangunan ekonomi daerah, serta dapat diarahkan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam rangka meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian daerah dengan memberdayakan sumber daya yang ada di daerah untuk menghasilkan output yang optimal (BPS,2016).

Capaian pendapatan masing-masing daerah kabupaten/kota tersebut bisa terjadi, tidak hanya pada daerah tersebut melainkan pada daerah kabupaten/kota di Indonesia lainnya, hal ini bisa terjadi karena masing-masing daerah memiliki sumber pemasukan pendapatan dari sektor daerah masing-masing yang berbeda menurut potensialnya, serta faktor lain yaitu bagaimana sistem pengelolaan pendapatan daerah masing-masing oleh daerah untuk pengalokasiannya untuk pengeluaran sebagai input untuk menghasilkan pembangunan ekonomi daerah.

Data-data yang telah dirilis tersebut, menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur yang merupakan daerah sektor industri pengolahan terbesar di Indonesia, memaparkan bahwa setiap daerah di kabupaten/kota di Jawa Timur tidak menunjukkan angka yang sama, bahkan relatif cukup besar selisih antar wilayah, hal tersebut terjadi karena setiap daerah memiliki sektor dan produk-produk yang berbeda dalam menghasilkan pendapatan daerah untuk dialokasikan pada pembangunan ekonomi daerah, serta manajemen pengelolaan keuangan yang berbeda dari masing-masing daerah sehingga mengakibatkan tingkat efisiensi daerah dalam mengelola input (sumber daya) yang terdapat di masing-masing daerah untuk menghasilkan sebuah output yang optimal (pertumbuhan ekonomi) berbeda-beda.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Pendapatan Daerah**

Konsep dan definisi dalam publikasi ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut:

Pendapatan Daerah didefinisikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah

- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

## 2.2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Kekuasaan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 6 Ayat (1), Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-Lain PAD yang sah.

## 2.3. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Kuncoro 2014). Menurut Adisasmita (2014), dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Dana perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut adalah saling mengisi dan melengkapi.

Menurut UU No. 25/1999 pasal 6 dan UU No. 33/2004 pasal 10, Dana Perimbangan terdiri dari: (1) Dana Bagi Hasil, yang terdiri atas PBB, BPHTB, PPh orang pribadi dan SDA (Sumber Daya Alam); (2) Dana Alokasi Umum (DAU); (3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Faktor yang mempengaruhi Dana Perimbangan:

- a. Penerimaan dari pajak dan bukan pajak
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus
- d. Dana Bagi Hasil
- e. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

## 2.4. Lain - lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain adalah hibah, dana darurat, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Adisasmita, 2014).

## 2.5. Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebuah kondisi ketika orang mengalami berbagai ancaman yang mengancam kesejahteraan hidup mereka, seperti ketidakcukupan konsumsi makanan, kerentanan, pendidikan yang terbatas, dan ketidakmampuan dalam mendapatkan pelayanan dasar kesehatan. Kemiskinan dapat juga disebabkan oleh gagalnya infrastruktur pemerintah dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari, termasuk persediaan air bersih, sanitasi dan tempat tinggal, serta kurangnya kesempatan untuk dapat berpartisipasi secara sejajar dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan politik (Tukiran, dkk., 2007).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah dengan tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi setiap penduduk miskin (BPS, 2013).

## 2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik (2007), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah yang merupakan acuan untuk mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan, serta kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita. Ukuran dari IPM merupakan salah satu variabel dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam sistem perekonomian wilayah.

## 2.7. Produk Domestik Regional Bruto

Indikator makro ekonomi yang digunakan untuk mengetahui tingkat atau kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu adalah dengan menganalisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2011).

Adisasmita (2014) mengungkapkan bahwa, alasan yang mendasari pemilihan PDRB sebagai indikator untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah:

- PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah.
- PDRB dihitung atas dasar konsep arus barang artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu.
- Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, menggunakan data sekunder. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data dan dianalisis menggunakan metode analisis DEA. Setelah menetapkan metode pengumpulan data, penelitian melanjutkan dengan pengolahan data menggunakan alat analisis DEA.

Pada penelitian ini, Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan alat analisis yang digunakan untuk operasional secara matematika untuk mengukur tingkat efisiensi teknik suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) yang memiliki banyak input dan banyak output kemudian membandingkan secara relatif terhadap UKE yang lain.

DEA merupakan perhitungan efisiensi, teknik relatif. Hipotesis untuk hasil perhitungan DEA adalah:

- UKE kurang efisien apabila efisiensi < 100%
- UKE efisien apabila efisiensi = 100%

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Analisis DEA dikatakan efisien apabila mencapai 100%, jika tidak mencapai 100% maka pengujian dikatakan tidak efisien. Variabel yang digunakan yaitu input dan output. Input yang digunakan yaitu data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Output yang digunakan yaitu PDRB, IPM, dan Penduduk tidak Miskin.

Tabel 4.1 Efisiensi Pengelolaan Keuangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Persen %)

| Kabupaten/<br>Kota | Tingkat Efisiensi |         |         |         |         |
|--------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|                    |                   |         |         |         |         |
| Bangkalan          | 0,48071           | 0,49461 | 0,52492 | 0,47420 | 0,43961 |
| Banyuwangi         | 0,67268           | 0,63937 | 0,75038 | 1,00000 | 0,76315 |
| Blitar             | 0,55815           | 0,60449 | 0,65735 | 0,67062 | 0,60862 |
| Bojonegoro         | 1,00000           | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
| Bondowoso          | 0,41834           | 0,38863 | 0,43102 | 0,40934 | 0,40139 |
| Gresik             | 1,00000           | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
| Jember             | 0,51123           | 0,52314 | 0,53116 | 0,50631 | 0,51319 |
| Jombang            | 0,39207           | 0,38409 | 0,39262 | 0,41946 | 0,42385 |

|                  |         |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kediri           | 0,47578 | 0,47574 | 0,45622 | 0,47526 | 0,62287 |
| Lamongan         | 0,33124 | 0,35850 | 0,35363 | 0,34484 | 0,40124 |
| Lumajang         | 0,42452 | 0,46240 | 0,44350 | 0,48502 | 0,49418 |
| Madiun           | 0,34628 | 0,37647 | 0,40107 | 0,42461 | 0,41386 |
| Magetan          | 0,42521 | 0,42555 | 0,41964 | 0,42498 | 0,41227 |
| Malang           | 0,75698 | 0,75201 | 0,79438 | 0,65879 | 0,64469 |
| Mojokerto        | 0,79238 | 0,80718 | 0,82843 | 0,94805 | 0,88145 |
| Nganjuk          | 0,28139 | 0,31048 | 0,32630 | 0,34736 | 0,34855 |
| Ngawi            | 0,38811 | 0,40387 | 0,39703 | 0,40096 | 0,38420 |
| Pacitan          | 0,37367 | 0,37867 | 0,40562 | 0,39454 | 0,37230 |
| Pamekasan        | 0,36633 | 0,37168 | 0,40131 | 0,42732 | 0,39746 |
| Pasuruan         | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
| Ponorogo         | 0,14358 | 0,15283 | 0,14411 | 0,14257 | 0,16949 |
| Probolinggo      | 0,24367 | 0,26824 | 0,25001 | 0,27871 | 0,30838 |
| Sampang          | 0,24700 | 0,26503 | 0,23291 | 0,20887 | 0,19236 |
| Sidoarjo         | 0,55358 | 0,51596 | 0,52452 | 0,54182 | 0,57133 |
| Situbondo        | 0,17939 | 0,32015 | 0,19916 | 0,20070 | 0,20368 |
| Sumenep          | 0,29882 | 0,28450 | 0,23350 | 0,26284 | 0,32854 |
| Trenggalek       | 0,16452 | 0,16179 | 0,11381 | 0,12305 | 0,15191 |
| Tuban            | 0,32756 | 0,30199 | 0,29920 | 0,27627 | 0,31297 |
| Tulungagung      | 0,20517 | 0,19099 | 0,15497 | 0,17643 | 0,35199 |
| Kota Batu        | 0,20933 | 0,20414 | 0,19180 | 0,16358 | 0,18062 |
| Kota Blitar      | 0,08768 | 0,08630 | 0,06944 | 0,08082 | 0,08278 |
| Kota Kediri      | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
| Kota Madiun      | 0,15345 | 0,17276 | 0,12836 | 0,14638 | 0,17369 |
| Kota Malang      | 0,40489 | 0,38064 | 0,35287 | 0,38114 | 0,38172 |
| Kota Mojokerto   | 0,08533 | 0,07124 | 0,07043 | 0,08323 | 0,08188 |
| Kota Pasuruan    | 0,10323 | 0,10725 | 0,10704 | 0,11895 | 0,15730 |
| Kota Probolinggo | 0,14017 | 0,12438 | 0,11826 | 0,11907 | 0,12143 |
| Kota Surabaya    | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |

Sumber : BPS diolah

Tabel 4.1 telah menunjukkan hasil olah data dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), berdasarkan hasil tersebut pada tahun 2017-2021 ada beberapa kabupaten/kota yang mencapai tingkat efisiensi 100% yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kota Kediri, dan Kota Surabaya. Adapun yang Tingkat efisiensi mencapai 100% di tahun tertentu yaitu Kabupaten Banyuwangi. Selain kabupaten/kota yang disebutkan maka masih belum mencapai tingkat efisien.

Kemudian sejalan dengan terdapatnya inefisiensi pada sebagian daerah di Provinsi Jawa Timur menurut data penelitian ini telah ditunjukkan beberapa pengelolaan keuangan yang tidak efisien, berdasarkan perhitungan dengan metode DEA telah ditemukan beberapa pemborosan penggunaan keuangan daerah atau dengan kata lain terdapat pengalokasian keuangan untuk pembangunan ekonomi guna untuk meningkatkan PDRB, IPM dan mengurangi kemiskinan yang kurang tepat, berdasarkan data-data penelitian ini yang telah diolah sebagai berikut (tabel 4.2) :

Tabel 4.2 Penggunaan Input yang Efisien pada Output yang Dihasilkan dan Pemborosan (Ribu Rupiah) tahun 2017-2021

| KABUPATEN/KOTA       | Tahun 2017                    |          |        |            |           |          |
|----------------------|-------------------------------|----------|--------|------------|-----------|----------|
|                      | Penggunaan input yang efisien |          |        | Pemborosan |           |          |
|                      | PAD                           | DP       | LPS    | PAD        | DP        | LPS      |
| Kabupaten Bangkalan  | 191,26                        | 1.729,80 | 108,06 | 0,00000    | 105,22916 | 21,51565 |
| Kabupaten Banyuwangi | 388,62                        | 2.025,02 | 279,28 | 0,00000    | 0,00000   | 91,46273 |
| Kabupaten Blitar     | 216,04                        | 1.863,93 | 114,49 | 0,00000    | 87,78621  | 23,99316 |
| Kabupaten Bojonegoro | 329                           | 2.599    | 108,89 | 0,00000    | 0,00000   | 0,00000  |

|                       |          |          |          |           |           |           |
|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kabupaten Bondowoso   | 153,75   | 1.561,05 | 283,13   | 0,00000   | 144,94365 | 97,15696  |
| Kabupaten Gresik      | 949,66   | 1.742,57 | 239,57   | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000   |
| Kabupaten Jember      | 526,36   | 2.806,06 | 183,63   | 11,08750  | 0,00000   | 0,00000   |
| Kabupaten Jombang     | 344,42   | 1.612,60 | 384,24   | 0,00000   | 0,00000   | 99,84738  |
| Kabupaten Kediri      | 291,32   | 2.026,45 | 134,01   | 0,00000   | 0,00000   | 16,04643  |
| Kabupaten Lamongan    | 413,03   | 2.051,79 | 146,91   | 5,10723   | 0,00000   | 0,00000   |
| Kabupaten Lumajang    | 254,66   | 1.543,54 | 106,44   | 0,00000   | 0,00000   | 6,61099   |
| Kabupaten Madiun      | 179,02   | 1.477,16 | 115,72   | 0,00000   | 21,80039  | 19,55404  |
| Kabupaten Magetan     | 147      | 1.402,23 | 101,58   | 0,00000   | 102,46533 | 22,50520  |
| Kabupaten Malang      | 426,3    | 2.717,44 | 258,29   | 0,00000   | 0,00000   | 81,79666  |
| Kabupaten Mojokerto   | 436,21   | 1.480,03 | 364,84   | 0,00000   | 0,00000   | 175,73958 |
| Kabupaten Nganjuk     | 308,56   | 1.817,21 | 118,03   | 0,00000   | 0,00000   | 2,02178   |
| Kabupaten Ngawi       | 166,81   | 1.638,30 | 86,99    | 0,00000   | 124,41040 | 12,33442  |
| Kabupaten Pacitan     | 139,13   | 1.323,76 | 73       | 0,00000   | 83,95330  | 10,07094  |
| Kabupaten Pamekasan   | 146,87   | 1.498,56 | 72,75    | 0,00000   | 123,94001 | 8,84315   |
| Kabupaten Pasuruan    | 498,91   | 2.221,53 | 189,3    | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000   |
| Kabupaten Ponorogo    | 225,13   | 1.738,61 | 138,74   | 0,00000   | 109,04725 | 7,11445   |
| Kabupaten Probolinggo | 219,69   | 1.688,59 | 137,23   | 0,00000   | 178,63440 | 12,23071  |
| Kabupaten Sampang     | 133,55   | 1.159,67 | 237,44   | 0,00000   | 142,97306 | 45,57963  |
| Kabupaten Sidoarjo    | 1.310,07 | 2.209,74 | 330,83   | 148,25895 | 0,00000   | 0,00000   |
| Kabupaten Situbondo   | 170,4    | 1.256,08 | 159,35   | 0,00000   | 92,38052  | 16,47542  |
| Kabupaten Sumenep     | 191,95   | 1.817,31 | 81,38    | 0,00000   | 293,58412 | 1,59402   |
| Kabupaten Trenggalek  | 175,92   | 1.418,17 | 88,44    | 0,00000   | 107,43871 | 3,08388   |
| Kabupaten Tuban       | 327,38   | 1.823,83 | 124,02   | 4,69588   | 151,44248 | 0,00000   |
| Kabupaten Tulungagung | 300,12   | 1.977,49 | 127,67   | 0,00000   | 137,91813 | 1,79941   |
| Kota Batu             | 124,06   | 587,12   | 51,46    | 0,00000   | 9,95509   | 0,48369   |
| Kota Blitar           | 123      | 596,35   | 60,85    | 0,00000   | 5,38318   | 1,06272   |
| Kota Kediri           | 202,31   | 879,89   | 80,15    | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000   |
| Kota Madiun           | 159,32   | 706,45   | 61,21    | 0,73922   | 5,29165   | 0,00000   |
| Kota Malang           | 409,47   | 1.195,21 | 177,35   | 0,00000   | 0,00000   | 14,50340  |
| Kota Mojokerto        | 163,31   | 551,42   | 63,48    | 0,00000   | 0,00000   | 0,37487   |
| Kota Pasuruan         | 129,63   | 651,09   | 63,79    | 0,00000   | 9,01200   | 1,28354   |
| Kota Probolinggo      | 152,48   | 691,81   | 52,49    | 2,80168   | 16,19979  | 0,00000   |
| Kota Surabaya         | 4.212,57 | 2.267,80 | 1.101,72 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000   |

| Tahun 2018           |                               |          |        |            |          |          |
|----------------------|-------------------------------|----------|--------|------------|----------|----------|
| KABUPATEN/KOTA       | Penggunaan input yang efisien |          |        | Pemborosan |          |          |
|                      | PAD                           | DP       | LPS    | PAD        | DP       | LPS      |
| Kabupaten Bangkalan  | 207,66                        | 1.659,73 | 202,77 | 0,00000    | 39,44589 | 39,85838 |
| Kabupaten Banyuwangi | 527,38                        | 2.164,50 | 288,86 | 0,00000    | 0,00000  | 0,00000  |
| Kabupaten Blitar     | 224,74                        | 1.803,65 | 266,68 | 0,00000    | 56,65190 | 81,27100 |

|                       |          |          |          |         |           |           |
|-----------------------|----------|----------|----------|---------|-----------|-----------|
| Kabupaten Bojonegoro  | 368,16   | 2.801,14 | 216,62   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   |
| Kabupaten Bondowoso   | 186,42   | 1.538,21 | 136,49   | 0,00000 | 46,57181  | 10,41650  |
| Kabupaten Gresik      | 947,57   | 1.719,16 | 230,77   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   |
| Kabupaten Jember      | 589,28   | 2.646,55 | 362,53   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   |
| Kabupaten Jombang     | 402,07   | 1.568,46 | 484,4    | 0,00000 | 0,00000   | 79,68953  |
| Kabupaten Kediri      | 452,81   | 2.071,47 | 165,89   | 0,00000 | 150,10341 | 0,00000   |
| Kabupaten Lamongan    | 471,57   | 2.073,10 | 253,73   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   |
| Kabupaten Lumajang    | 264,05   | 1.590,39 | 193,58   | 0,00000 | 0,00000   | 12,43173  |
| Kabupaten Madiun      | 185,51   | 1.437,71 | 164,95   | 0,00000 | 9,88602   | 21,00643  |
| Kabupaten Magetan     | 165,66   | 1.444,72 | 124,26   | 0,00000 | 78,42808  | 11,39965  |
| Kabupaten Malang      | 489,33   | 2.758,23 | 471,53   | 0,00000 | 0,00000   | 118,44066 |
| Kabupaten Mojokerto   | 474,79   | 1.429,73 | 412,37   | 0,00000 | 0,00000   | 138,32105 |
| Kabupaten Nganjuk     | 329,47   | 1.587,91 | 206,32   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   |
| Kabupaten Ngawi       | 180,78   | 1.640,88 | 152,55   | 0,00000 | 107,19507 | 18,65151  |
| Kabupaten Pacitan     | 155,22   | 1.301,56 | 123,91   | 0,00000 | 45,65599  | 12,33722  |
| Kabupaten Pamekasan   | 163,64   | 1.419,28 | 142,06   | 0,00000 | 64,75603  | 17,01403  |
| Kabupaten Pasuruan    | 572,57   | 2.198,58 | 395,3    | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   |
| Kabupaten Ponorogo    | 235,84   | 1.804,14 | 214,98   | 0,00000 | 146,96117 | 17,29121  |
| Kabupaten Probolinggo | 220,81   | 1.718,83 | 216,82   | 0,00000 | 249,46737 | 32,58427  |
| Kabupaten Sampang     | 137,25   | 1.201,20 | 331,47   | 0,00000 | 188,40758 | 72,14319  |
| Kabupaten Sidoarjo    | 1.431,05 | 2.131,84 | 483,37   | 0,00000 | 0,00000   | 144,39438 |
| Kabupaten Situbondo   | 185,01   | 1.180,82 | 134,45   | 0,00000 | 166,44090 | 17,46775  |
| Kabupaten Sumenep     | 221,3    | 1.819,55 | 139,71   | 0,00000 | 292,74366 | 12,56094  |
| Kabupaten Trenggalek  | 199      | 1.414,85 | 146,15   | 0,00000 | 113,88723 | 9,74279   |
| Kabupaten Tuban       | 378,16   | 1.712,03 | 189,51   | 0,00000 | 109,04220 | 7,91735   |
| Kabupaten Tulungagung | 359,28   | 1.904,28 | 212,51   | 0,00000 | 118,55861 | 10,95675  |
| Kota Batu             | 143,5    | 712,39   | 79,3     | 0,00000 | 40,77639  | 3,53889   |
| Kota Blitar           | 140,06   | 650,44   | 81,67    | 0,00000 | 12,95298  | 1,82887   |
| Kota Kediri           | 225,91   | 807,05   | 97,55    | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   |
| Kota Madiun           | 196,8    | 650,49   | 61,37    | 0,00000 | 20,25333  | 0,00000   |
| Kota Malang           | 486,33   | 1.173,53 | 304,65   | 0,00000 | 0,00000   | 65,87003  |
| Kota Mojokerto        | 200,64   | 616,45   | 75,04    | 0,00000 | 0,00000   | 0,16752   |
| Kota Pasuruan         | 139,47   | 656,77   | 83,23    | 0,00000 | 17,00159  | 2,46737   |
| Kota Probolinggo      | 167,53   | 656,43   | 89,84    | 0,00000 | 7,20652   | 2,17654   |
| Kota Surabaya         | 4.712,86 | 2.200,61 | 1.214,74 | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   |

| Tahun 2019           |                               |          |        |            |           |          |
|----------------------|-------------------------------|----------|--------|------------|-----------|----------|
| KABUPATEN/KOTA       | Penggunaan input yang efisien |          |        | Pemborosan |           |          |
|                      | PAD                           | DP       | LPS    | PAD        | DP        | LPS      |
| Kabupaten Bangkalan  | 215,94                        | 1.874,84 | 217,88 | 0,00000    | 561,35236 | 45,03212 |
| Kabupaten Banyuwangi | 571,7                         | 2.365,43 | 233,27 | 0,00000    | 0,00000   | 0,00000  |
| Kabupaten Blitar     | 237,31                        | 1.912,93 | 212,32 | 0,00000    | 675,62147 | 44,14562 |

|                       |          |          |          |         |           |          |
|-----------------------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
| Kabupaten Bojonegoro  | 482,55   | 3.933,21 | 214,51   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000  |
| Kabupaten Bondowoso   | 193,33   | 1.699,76 | 143,08   | 0,00000 | 421,81994 | 10,69753 |
| Kabupaten Gresik      | 909,91   | 1.822,96 | 307,75   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000  |
| Kabupaten Jember      | 630,62   | 2.665,89 | 375,29   | 0,00000 | 19,67248  | 0,00000  |
| Kabupaten Jombang     | 439,13   | 1.693,86 | 516,43   | 0,00000 | 21,96684  | 97,29526 |
| Kabupaten Kediri      | 391      | 2.256,87 | 295,34   | 0,00000 | 364,28375 | 25,62305 |
| Kabupaten Lamongan    | 503,99   | 2.154,34 | 280,97   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000  |
| Kabupaten Lumajang    | 310,87   | 1.675,54 | 254,72   | 0,00000 | 228,85545 | 28,63183 |
| Kabupaten Madiun      | 200,52   | 1.581,08 | 166,61   | 0,00000 | 334,15649 | 17,62748 |
| Kabupaten Magetan     | 192,75   | 1.430,44 | 127,62   | 0,00000 | 298,57351 | 4,07636  |
| Kabupaten Malang      | 525,97   | 3.031,08 | 444,59   | 0,00000 | 849,40582 | 97,59137 |
| Kabupaten Mojokerto   | 501,07   | 1.769,71 | 242,87   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000  |
| Kabupaten Nganjuk     | 342,77   | 1.683,82 | 211,67   | 0,00000 | 132,25511 | 0,65132  |
| Kabupaten Ngawi       | 211,01   | 1.765,17 | 160,37   | 0,00000 | 388,34740 | 12,42485 |
| Kabupaten Pacitan     | 166,32   | 1.432,09 | 127,87   | 0,00000 | 329,25542 | 10,59939 |
| Kabupaten Pamekasan   | 173,69   | 1.556,60 | 140,55   | 0,00000 | 364,68816 | 13,76602 |
| Kabupaten Pasuruan    | 643,35   | 2.399,63 | 393,54   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000  |
| Kabupaten Ponorogo    | 247,54   | 1.857,98 | 200,92   | 0,00000 | 138,47261 | 12,91132 |
| Kabupaten Probolinggo | 233,48   | 1.940,68 | 202,58   | 0,00000 | 273,65213 | 24,39583 |
| Kabupaten Sampang     | 149,92   | 1.488,87 | 152,3    | 0,00000 | 220,23204 | 19,76887 |
| Kabupaten Sidoarjo    | 1.603    | 2.127,23 | 496,26   | 0,00000 | 0,00000   | 19,60863 |
| Kabupaten Situbondo   | 189,33   | 1.419,73 | 76,62    | 3,77593 | 159,79170 | 0,00000  |
| Kabupaten Sumenep     | 254,49   | 2.048,64 | 138,3    | 0,00000 | 263,00913 | 5,56893  |
| Kabupaten Trenggalek  | 280,17   | 1.572,81 | 162,38   | 0,00000 | 63,44607  | 4,14045  |
| Kabupaten Tuban       | 396,86   | 1.822,16 | 170,1    | 5,57346 | 135,07520 | 0,00000  |
| Kabupaten Tulungagung | 439,53   | 2.008,52 | 199,69   | 0,00000 | 64,41787  | 0,31349  |
| Kota Batu             | 153,33   | 744,68   | 85,71    | 0,00000 | 36,25316  | 3,21338  |
| Kota Blitar           | 173,65   | 701,61   | 81,67    | 0,00000 | 5,02104   | 0,24828  |
| Kota Kediri           | 224,56   | 813,8    | 100,99   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000  |
| Kota Madiun           | 206,49   | 785,55   | 107,31   | 0,00000 | 4,77957   | 1,85438  |
| Kota Malang           | 533,51   | 1.289,52 | 278,33   | 0,00000 | 0,00000   | 29,71909 |
| Kota Mojokerto        | 205,92   | 630,8    | 89,39    | 0,00000 | 0,00000   | 0,35209  |
| Kota Pasuruan         | 139,03   | 682,48   | 69,15    | 0,00000 | 19,12221  | 0,70915  |
| Kota Probolinggo      | 175,93   | 761,55   | 135,16   | 0,00000 | 14,66263  | 6,62743  |
| Kota Surabaya         | 5.190,30 | 2.401,96 | 1.166,55 | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000  |

| Tahun 2020           |                               |          |          |            |           |          |
|----------------------|-------------------------------|----------|----------|------------|-----------|----------|
| KABUPATEN/KOTA       | Penggunaan input yang efisien |          |          | Pemborosan |           |          |
|                      | PAD                           | DP       | LPS      | PAD        | DP        | LPS      |
| Kabupaten Bangkalan  | 261,8                         | 1.819,34 | 218,99   | 0,00000    | 452,83176 | 33,11968 |
| Kabupaten Banyuwangi | 595,21                        | 772,3    | 1.972,26 | 0,00000    | 0,00000   | 0,00000  |

|                       |          |          |          |          |           |           |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Kabupaten Blitar      | 263,66   | 1.874,81 | 243,58   | 0,00000  | 673,48538 | 62,61859  |
| Kabupaten Bojonegoro  | 843,28   | 3.018,06 | 223,36   | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000   |
| Kabupaten Bondowoso   | 232,93   | 1.679,35 | 144,06   | 0,00000  | 372,61156 | 4,65028   |
| Kabupaten Gresik      | 1.163,67 | 1.834    | 416,97   | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000   |
| Kabupaten Jember      | 750,02   | 2.793,79 | 417,1    | 0,00000  | 156,01445 | 0,00000   |
| Kabupaten Jombang     | 467,36   | 1.693,12 | 518,19   | 0,00000  | 62,92213  | 105,67808 |
| Kabupaten Kediri      | 424,92   | 2.197,61 | 322,87   | 0,00000  | 377,65317 | 38,39829  |
| Kabupaten Lamongan    | 554,42   | 2.176,42 | 345,97   | 0,00000  | 119,26421 | 10,38599  |
| Kabupaten Lumajang    | 320,54   | 1.662,38 | 299,51   | 0,00000  | 292,96970 | 56,69888  |
| Kabupaten Madiun      | 219,45   | 1.516    | 177,77   | 0,00000  | 335,91399 | 22,39826  |
| Kabupaten Magetan     | 222,6    | 1.519,82 | 122,82   | 0,00000  | 331,99868 | 0,00000   |
| Kabupaten Malang      | 715,98   | 2.948,22 | 465,68   | 0,00000  | 384,88079 | 38,07035  |
| Kabupaten Mojokerto   | 542,34   | 1.732,04 | 233,5    | 31,58674 | 0,00000   | 0,00000   |
| Kabupaten Nganjuk     | 367,11   | 1.791,46 | 217,27   | 0,00000  | 201,24066 | 2,82344   |
| Kabupaten Ngawi       | 238,29   | 1.768,69 | 174,19   | 0,00000  | 393,71173 | 15,41178  |
| Kabupaten Pacitan     | 194,71   | 1.385,44 | 135,08   | 0,00000  | 292,96498 | 9,52974   |
| Kabupaten Pamekasan   | 184,41   | 1.499,57 | 157,87   | 0,00000  | 380,61431 | 22,56791  |
| Kabupaten Pasuruan    | 731,16   | 2.414,12 | 416,54   | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000   |
| Kabupaten Ponorogo    | 295,96   | 1.859,69 | 221,91   | 0,00000  | 116,82473 | 14,13234  |
| Kabupaten Probolinggo | 244,68   | 1.975,96 | 224,64   | 0,00000  | 311,01375 | 34,31662  |
| Kabupaten Sampang     | 198,96   | 1.508,87 | 159,92   | 0,00000  | 169,08389 | 16,16128  |
| Kabupaten Sidoarjo    | 1.810,10 | 2.196,29 | 530,2    | 0,00000  | 0,00000   | 34,45974  |
| Kabupaten Situbondo   | 197,1    | 1.410,39 | 140,23   | 0,00000  | 144,02038 | 11,73251  |
| Kabupaten Sumenep     | 266,8    | 1.998,46 | 142,39   | 0,00000  | 278,78156 | 8,33219   |
| Kabupaten Trenggalek  | 302,58   | 1.508,67 | 166,38   | 0,00000  | 54,77306  | 5,02639   |
| Kabupaten Tuban       | 564,66   | 1.845,75 | 190,99   | 28,81623 | 62,88421  | 0,00000   |
| Kabupaten Tulungagung | 446,58   | 1.936,13 | 200,64   | 0,00000  | 64,64607  | 2,71076   |
| Kota Batu             | 207,03   | 703,13   | 89,9     | 0,00000  | 0,00000   | 0,93001   |
| Kota Blitar           | 174,02   | 655,39   | 91,12    | 0,00000  | 3,53319   | 1,52941   |
| Kota Kediri           | 251,28   | 883,24   | 104,25   | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000   |
| Kota Madiun           | 235,5    | 736,52   | 84,88    | 4,52437  | 2,54537   | 0,00000   |
| Kota Malang           | 731,1    | 1.275,09 | 283,13   | 0,00000  | 0,00000   | 25,98882  |
| Kota Mojokerto        | 205,94   | 590,49   | 89,39    | 0,00000  | 0,00000   | 1,08659   |
| Kota Pasuruan         | 142,87   | 625,49   | 80,59    | 0,00000  | 14,66793  | 2,53571   |
| Kota Probolinggo      | 200,98   | 740,2    | 136,65   | 0,00000  | 4,02004   | 6,34252   |
| Kota Surabaya         | 5.584,63 | 2.360,28 | 1.138,17 | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000   |

| Tahun 2021           |                               |          |        |            |           |          |
|----------------------|-------------------------------|----------|--------|------------|-----------|----------|
| KABUPATEN/KOTA       | Penggunaan input yang efisien |          |        | Pemborosan |           |          |
|                      | PAD                           | DP       | LPS    | PAD        | DP        | LPS      |
| Kabupaten Bangkalan  | 262,47                        | 1.734,28 | 226,31 | 0,00000    | 415,37011 | 39,50799 |
| Kabupaten Banyuwangi | 592,74                        | 2.200,95 | 242,63 | 0,00000    | 59,13318  | 0,00000  |

|                       |          |          |          |          |           |          |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Kabupaten Blitar      | 284,05   | 1.766,78 | 229,22   | 0,00000  | 555,34438 | 49,64119 |
| Kabupaten Bojonegoro  | 691,31   | 2.894,85 | 202,58   | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000  |
| Kabupaten Bondowoso   | 233,31   | 1.614,27 | 151,66   | 0,00000  | 366,29365 | 12,19395 |
| Kabupaten Gresik      | 1.132,30 | 1.710,22 | 429,02   | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000  |
| Kabupaten Jember      | 716,85   | 2.569,37 | 422,14   | 0,00000  | 212,12492 | 25,40398 |
| Kabupaten Jombang     | 477,85   | 1.899,18 | 232,82   | 0,00000  | 161,45770 | 0,00000  |
| Kabupaten Kediri      | 425,69   | 2.198,81 | 152,75   | 0,00000  | 350,01843 | 0,00000  |
| Kabupaten Lamongan    | 467,69   | 2.036,82 | 425,93   | 0,00000  | 252,85103 | 73,35108 |
| Kabupaten Lumajang    | 307,95   | 1.572,64 | 256,02   | 0,00000  | 319,45852 | 47,41153 |
| Kabupaten Madiun      | 220,77   | 1.471,90 | 125,14   | 0,00000  | 334,36106 | 4,29497  |
| Kabupaten Magetan     | 218,92   | 1.455,44 | 136,72   | 0,00000  | 328,58113 | 9,44897  |
| Kabupaten Malang      | 715,98   | 2.817,38 | 470,79   | 0,00000  | 428,05884 | 63,56962 |
| Kabupaten Mojokerto   | 540,12   | 1.682,16 | 233,5    | 29,04787 | 0,00000   | 0,00000  |
| Kabupaten Nganjuk     | 359,76   | 1.580,96 | 193,65   | 0,00000  | 173,90051 | 2,31330  |
| Kabupaten Ngawi       | 242,03   | 1.730,23 | 155,21   | 0,00000  | 385,08165 | 11,29408 |
| Kabupaten Pacitan     | 200,69   | 1.317,69 | 134      | 0,00000  | 265,85688 | 11,04843 |
| Kabupaten Pamekasan   | 194,57   | 1.464,23 | 151,65   | 0,00000  | 349,37679 | 20,07438 |
| Kabupaten Pasuruan    | 724,01   | 2.177,56 | 376,36   | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000  |
| Kabupaten Ponorogo    | 271,64   | 1.720,74 | 213,44   | 0,00000  | 150,92509 | 15,75468 |
| Kabupaten Probolinggo | 241,65   | 1.876,62 | 217,85   | 0,00000  | 350,94865 | 34,12793 |
| Kabupaten Sampang     | 228,94   | 1.500,48 | 142,05   | 0,00000  | 154,02770 | 7,79137  |
| Kabupaten Sidoarjo    | 1.609,82 | 2.014,32 | 586,68   | 0,00000  | 0,00000   | 87,09041 |
| Kabupaten Situbondo   | 212,06   | 1.322,64 | 183,77   | 0,00000  | 137,37827 | 18,27232 |
| Kabupaten Sumenep     | 231,59   | 1.936,73 | 142,92   | 0,00000  | 403,73460 | 13,20690 |
| Kabupaten Trenggalek  | 268,64   | 1.421,09 | 165,75   | 0,00000  | 91,14551  | 7,07830  |
| Kabupaten Tuban       | 480,01   | 1.683,81 | 196,3    | 11,71804 | 103,62831 | 0,00000  |
| Kabupaten Tulungagung | 436,04   | 1.849,53 | 108,69   | 67,22774 | 387,38392 | 0,00000  |
| Kota Batu             | 200      | 689,97   | 108,8    | 0,00000  | 14,21054  | 3,62880  |
| Kota Blitar           | 187,33   | 605,3    | 92,95    | 0,00000  | 2,70962   | 0,81628  |
| Kota Kediri           | 272,35   | 832,43   | 120,8    | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000  |
| Kota Madiun           | 226,89   | 692,15   | 84,74    | 6,22499  | 18,79500  | 0,00000  |
| Kota Malang           | 776,69   | 1.198,11 | 276,09   | 0,00000  | 0,00000   | 17,09943 |
| Kota Mojokerto        | 202,83   | 580,06   | 86,8     | 0,00000  | 0,00000   | 0,05529  |
| Kota Pasuruan         | 133,36   | 594,95   | 52,52    | 2,35175  | 36,65613  | 0,00000  |
| Kota Probolinggo      | 216,83   | 671,85   | 136,23   | 0,00000  | 1,10687   | 4,86398  |
| Kota Surabaya         | 5.561,56 | 2.069,38 | 1.029,46 | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000  |

Sumber : BPS Diolah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DP : Dana Perimbangan

LPS : Lain-lain Pendapatan yang Sah

Berdasarkan analisis per unit (tabel 4.2), telah menunjukkan seberapa besar dana yang berasal dari sumber pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah yang sebaiknya digunakan untuk mencapai efisiensi 100% dan dalam hasil tersebut juga telah menunjukkan seberapa besar pemborosan dana yang telah digunakan untuk pembangunan dalam usaha peningkatan PDRB, IPM dan mengurangi kemiskinan pada masing-masing daerah yang telah terindikasi tidak efisien relatif 100% dalam pengelolaan keuangan pada sektor tersebut, pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada tahun 2017-2021 rata-rata pemborosan pada kabupaten/kota di Jawa Timur terletak pada dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sebagai variabel input yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, yaitu dalam peningkatan PDRB, peningkatan IPM dan pengentasan kemiskinan sebagai ukuran tingkat capaian kesejahteraan masyarakat dalam menikmati adanya pembangunan ekonomi.

Inefisiensi terjadi karena adanya indikasi bahwa daerah yang mengalami inefisiensi dikarenakan adanya pemborosan dalam penggunaan variabel input. Untuk mengatasi inefisiensi yang menyebabkan pemborosan penggunaan variabel input maka dalam hasil analisis DEA telah ditunjukkan cara mengatasi inefisiensi dengan mengurangi penggunaan input berdasarkan hasil analisis DEA. Kemudian untuk daerah yang mengalami inefisiensi agar mencapai tingkat efisiensi 100% dapat mengacu pada daerah lain yang sudah mencapai efisiensi relatif 100% yang telah ditunjukkan dalam analisis DEA.

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang telah mencapai tingkat efisiensi maksimal diharapkan dapat mempertahankan demi kemajuan pembangunan ekonomi yang lebih baik lagi. Sedangkan untuk daerah yang belum mencapai tingkat efisiensi maksimal diharapkan agar mampu menekan penggunaan inputnya dan mengimbangi outputnya. Jika dilihat dari jumlah pendapatan asli daerah (PAD) memang terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masing-masing daerah tersebut, faktor lain yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, faktor-faktor sosial, birokrasi, politik, dan budaya serta kondisi geografis. Namun demikian adanya perbedaan sumber daya dan faktor-faktor lain bukanlah menjadi hambatan untuk mendapatkan output yang maksimal. Yang perlu dilakukan adalah mengambil langkah pengawasan dan evaluasi penggunaan setiap input agar tidak terjadi pemborosan yang dapat mengakibatkan inefisiensi. Selain itu, diperlukan juga penyusunan rencana penggunaan dana input terhadap sektor-sektor yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan agar pada masa yang akan datang mampu mencapai tingkat efisiensi 100%.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [2] Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- [3] Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- [4] Chusnah, S. (2014). *Efisiensi sektor publik dan kinerja ekonomi daerah (studi kasus kabupaten/kota di Jawa Timur)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- [5] Kurnia, Akhmad Syakir. 2006. *Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik Metode Free Disposable Hull (FDH)*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11, No. 2.
- [6] Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 2003. *Ilmu Mikro Ekonomi*, Edisi 17. Alih bahasa oleh Nur Rosyidah, Anna Elly, dan Bosco Carvallo. Jakarta: P.T. Media Global Edukasi.
- [7] Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*, Edisi 17. Alih bahasa oleh Greta, Theres Tanoto, Bosco Carvallo, dan Anna Elly. Jakarta: P.T. Media Global Edukasi.
- [8] Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [9] Kuncoro, Mudrajat. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, Edisi 3. Jakarta: Erlangga.